



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN
2. Jabatan : KEPALA SATPOL PP
3. NHK : 45001

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **11.087.560.000**

1. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 585.925.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 415.008.000
3. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.642.925.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/27 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 88.245.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/90 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 734.591.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 357.780.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.163.859.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.591.527.000
9. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.507.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **393.500.000**



1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, HONDA HONDA CRV RM3 2WD2 4AT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI BJ250L Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	689.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	12.297.060.000
III. HUTANG	Rp.	546.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.751.060.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.